

# DARI KOSMOLOGI HINGGA KOMODITI: MENABUR ASA MENUAI LUKA DALAM PUSARAN DAERAH ISTIMEWA

Lucia Yerinta Destishinta<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281

\*Corresponding author: lucia.yerinta.d@mail.ugm.ac.id

**Abstract** Pembangunan infrastruktur dampak dari penganugerahan UNESCO kepada Sumbu Filosofi di Yogyakarta, sebagai warisan budaya dunia yang telah diakui secara resmi. Sebaik-baiknya pembangunan, adalah yang melihat bukan hanya dari fasad, namun juga nilai-nilai yang bertumbuh dalam denyut hidup manusia. Indikator keberhasilan pembangunan, bukan hanya dalam wujud fisik sebuah fasad namun juga dalam nilai-nilai filosofis, sebagaimana ruh yang tersemat pada Sumbu Filosofi. Oleh karenanya, pemilihan etnografi kritis sebagai cara alternatif yang menawarkan pembacaan etnografi dalam deskripsi kritis mengenai pembangunan dan ambivalensinya terhadap jurang ketimpangan yang semakin lebar, secara khusus mengenai masyarakat lokal di Yogyakarta yang kian tergusur dan tergerus oleh kentalnya pembangunan yang mengatasnamakan kultural sebagai tameng atas kepentingan kapital. Komodifikasi dari kosmologi menjadi komoditi samar-samar namun nyata. Yogyakarta menjadi laboratorium hidup untuk ruang kelas tanpa sekat yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif, apabila ditunjang dengan infrastruktur pendukung yang sarat makna. Ambivalensi dalam pembangunan bisa membawa dua hal; pembangunan akan menjadi baik, jika dibarengi dengan konsep matang demi kepentingan komunal bukan segelintir kelompok berdasar kepentingan politis. Sebaliknya, ketika pembangunan masih mengedepankan nilai-nilai kapital, dapat dipastikan jurang ketimpangan akan semakin lebar. Jebakan terhadap glorifikasi kultur dalam sebuah kota serta meromantisir gaya hidup, tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran dan daya pikir yang kritis. Jika dengan pengakuan UNESCO atas Sumbu Filosofi masih terdapat ketimpangan yang tinggi, lantas untuk siapa sebenarnya keistimewaan Yogyakarta?

## **Keyword:**

Sumbu filosofi, ketimpangan, pembangunan infrastruktur, kapitalisme

## **Article Info**

Received : 04 Jul 2024

Accepted : 23 Jul 2024

Published : 15 Nov 2024

## **1. Pendahuluan**

Seorang kawan yang sedang menempuh studi di Paris - Prancis, pernah berkisah bahwa betapa ia terpuakau dengan *Axe Historique* atau Sumbu Historis yang memiliki sejarah panjang. Ia menyadari bahwa sejarah Prancis tidak berhenti sebab pemerintah negara Prancis turut ambil bagian dalam meneruskan nilai-nilai sejarah yang membangkitkan kebanggaan hingga rasa

nasionalisme masyarakat Prancis. Maka didirikan monument *La Grande Arche de la Défense* di ujung barat sumbu historis, fasad yang berdiri bertepatan dengan peringatan 200 tahun Revolusi Prancis, dibangun untuk menegaskan visi Negara Prancis di era modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender. Tanpa adanya sebuah ambisi untuk menyebut sebagai *The World Heritage City*, Prancis memberikan sebuah pelajaran penting tentang bagaimana menghidupkan nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam *Axe Historique*. Kesadaran akan pentingnya sejarah dan pemaknaan nilai-nilai dalam kemanusiaan menjadi latar belakang pada pembangunan sebuah wilayah, yang kemudian berbuah sejahtera bagi rakyatnya.

Tanpa tendensi untuk saling membandingkan, hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta. Kota yang *katanya* istimewa, mengawal perjalanan banyak insan hingga enggan untuk berpaling, berbagi pengamalan dan berbagai pengalaman menempa hingga menjadi manusia yang elastis, dalam kehidupan yang serba dinamis. Usai Yogyakarta mendapatkan penganugerahan dari UNESCO pada tahun 2023 silam, istilah *Yogyakarta City of Philosophy* juga kian marak digaungkan demi mendukung animo atas penganugerahan dari UNESCO. Identitas baru sebagai *City of Philosophy* yang melekat belakangan ini menjadi populis setelah julukan Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya. Kontradiktif kian terlihat saat Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, namun euforia tersebut justru tidak dirasakan secara eksplisit maupun implisit oleh warga lokal yang bersinggungan langsung dalam jalur Sumbu Filosofi, terutama para buruh prekariat seperti: penarik becak, pengemudi ojek, buruh *gendong* di pasar, pekerja lepas, seniman, serta penjaja makanan yang berkeliling di area pertokoan sepanjang Jalan Malioboro.

Privatisasi ruang komunal akibat adanya kepentingan pembangunan antara para kapital dan rakyat, menjadikan ruang hidup meredup, sebab suara-suara liyan yang sering diabaikan. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan lebih berpihak kepada kepentingan para kapitalis, sebagaimana pemikiran Marx atas kritiknya tentang keberpihakan terhadap kelas yang berkuasa, yaitu para borjuis dan atau kapitalis. Hegemoni pemerintah terhadap rakyat seakan menjadi nyata, sebab kunci konsep hegemoni adalah proses kekuasaan yang menjadikan pengetahuan serta mobilisasi sumber daya sebagai legitimasi kelas sosial. Hegemoni kemudian menjadi instrumen dari kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan atas pemerintah yang telah dibangun, bisa terjadi melalui proses penetrasi pengetahuan dan keyakinan melalui pembiasaan maupun indoktrinasi, sehingga terjadi kesadaran kolektif. Lebih jauh, legitimasi pada kelas sosial yang terbangun atas adanya sebuah hegemoni, menyangkut atas ruang sosial yang digunakan untuk kepentingan kapital, akibatnya rakyat menjadi sebagai pihak lawan – mereka, rakyat yang berada dalam kelas proletar.

Yogyakarta memiliki kearifan budaya Jawa yang tergambar melalui berbagai aspek yang menjadikan daerah ini tidak akan pernah lepas dengan tradisi dan adat-istiadat yang terikat dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Keistimewaan bukan semata-mata filosofis pada kehidupan masyarakat saja, namun juga konsistensinya sebagai bagian pendirian bangsa negara Indonesia (Lay, et.al, 2008). Relasi historis dan korelasinya dengan Yogyakarta bukan dua entitas yang berdiri sendiri-sendiri, karena menjadi dasar identitas Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar, kota pariwisata dan masih banyak lagi. Nilai pada Kosmologi *Memayu Hayuning Bawana* secara umum dimaknai sebagai visi misi hidup masyarakat Jawa guna memperindah dunia yang termanidestasi melalui tingkah laku hidup.

Akan tetapi yang terjadi tidaklah seindah ungkapan dalam nilai filosofi Jawa. Ruang penghidupan yang telah ditempati sebagai rumah tinggal atau ruang usaha selama puluhan tahun, terancam diubah untuk kepentingan pembangunan yang mengatas-namakan nilai kultural berlandas kosmologis. Tidak berhenti sampai situ saja, rakyat yang tidak memiliki hak

suara, sebab ketiadaan hak legalitas atas tanah yang mereka tempati, menjadi rentan terhadap pelanggaran hak-hak dan dianggap sebagai penghalang pembangunan pada proses revitalisasi Sumbu Filosofi. Demi penguasaan atas ruang tersebut, dominasi kapital menggunakan kuasanya untuk tidak mendengarkan suara-suara proletar guna melancarkan integrasi ruang.

## 2. Metode

Artikel ini berisi dua komponen, yakni data historis-etnografis dan diskursus akademik mengenai ambivalensi pada revitalisasi Sumbu Filosofi. Data historis dikumpulkan melalui koleksi arsip di Perpustakaan milik Kraton dan Dinas Kebudayaan, serta arsip terkait advokasi rakyat yang terdampak pembangunan melalui LBH Yogyakarta, ditambah dengan berbagai sumber arsip lainnya yang bisa diakses melalui jaringan internet, untuk memahami perjuangan konsolidasi rakyat lebih dalam. Selain data historis, adapula data etnografis di Kawasan Sumbu Filosofi, kemudian selanjutnya meramu informasi diskursus akademik mengenai pembangunan berbasis nilai-nilai akar rumput pada masyarakat melalui riset lapangan. Kedua komponen ini kemudian disatukan agar fakta historis-etnografis serta data lapangan yang dimiliki terkoneksi dalam pemikiran akademik. Pemilihan lokasi studi ini sebagai sebuah sinyal kegelisahan atas ketimpangan sebagai efek domino dari pembangunan infrastruktur sebagai bentuk revitalisasi Sumbu Filosofi. Riset dimulai sejak bulan awal bulan Maret 2024 hingga pertengahan bulan Mei 2024. Pembahasan dalam artikel ini dilakukan secara kronologis untuk menguraikan bagaimana proses adaptasi serta resiliensi ketahanan masyarakat terhadap bentuk kepemimpinan aristokrat yang membuat kaum prekariat kehilangan suaranya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. *Nrimo ing Pandum* dalam Ruang Hidup yang Kian Redup

Euforia terhadap glorifikasi atas pemahaman sejarah yang dogmatis, menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan kepercayaan buta terhadap sistem yang berjalan, hingga mendorong topik kemiskinan kian merebak, pada saat yang sama kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar. Dalam sebuah studi tentang kemiskinan gelombang terbaru, ada kajian perang untuk melawan masyarakat miskin yang menyertai kebangkitan ekonomi baru seperti yang terjadi di Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir. Menghubungkan korelasi antara etnografi dengan kemiskinan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, sebuah buku berjudul *The Poverty Studies: The Ethnography of Power, Politics, and Impoverished People in the United States*, menyoroti cara-cara kemiskinan sengaja dibangun dalam berbagai skala. Kebijakan neoliberal yang menjadi sorotan karena telah menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi polarisasi di Amerika Serikat.

Setiap tahun, Yogyakarta terus mengalami pertumbuhan pembangunan, hingga puncaknya pada tahun 2012 setelah referendum keistimewaan, yang berujung pada terjadinya berbagai konflik di masyarakat secara khusus masyarakat Yogyakarta (Kinasih, dkk., 2023). Kendati dalam kapitalisme sangat mendukung roda ekonomi bagi kelas borjuasi yang diuntungkan, namun dampak dari kapitalisme salah satunya adalah kerusakan; baik kerusakan pada lingkungan hingga kerusakan pada manusia, sebab kapitalisme berangkat dari ruh tamak (Gorz, 2002). Spiritualitas yang salah nampak telah terbentuk untuk hidup dalam sebuah ekologi budaya. Kapitalisme menjadi cara yang dipilih untuk melancarkan pembangunan pertumbuhan perekonomian hingga dapat mendominasi dengan cepat dan berakhir dengan terciptanya degradasi dalam sisi lain yang lemah dan dirugikan. Hal tersebut dapat memantik konflik dalam kelompok masyarakat yang merasa bahwa tidak memiliki dampak secara langsung dari adanya pembangunan karena coraknya yang kapitalistik.

Dahrendorf (1959) menggunakan teori perjuangan kelas marxian guna membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam menganalisis masyarakat industri modern. Menurutnya, kelas tidak semata tentang pemilikan sarana-sarana produksi; sebagaimana yang selalu ditekankan, namun juga lebih pada kepemilikan atas kekuasaan, yang mencakup hak absah untuk menguasai orang atau kelompok lain. Akumulasi dalam kapital merupakan sebuah aktivitas yang bekerja dengan berbagai cara, salah satu cara adalah bekerja melalui citra pembangunan. Meskipun Bonefeld (2011) melihat akumulasi sebagai pemisahan antara pekerja dengan alat-alat produksi (Bonefeld, 2011). Schmid (2015) melihat akumulasi sebagai perampasan –*accumulation by dispossession*– (Schmid, 2015). Pemisahan, penguasaan, dan perampasan membuktikan bahwa dalam akumulasi kapital juga terdapat privatisasi. Tujuan utama privatisasi adalah meningkatkan profitabilitas (Lombard & Morris, 2012). Dalam hal ini, negara berperan besar pada privatisasi melalui eksklusi lahan dengan dalih memenuhi kebutuhan penduduk dan keseimbangan alam (Hall et al., 2011).

Kesenjangan antar kelas yang terbentuk karena suburnya kapitalisme yang mengakar dan meluas adalah sebuah paham yang telah menjadi sebuah isu global tercipta karena adanya keserakahan kekuasaan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh kaum borjuasi atau kapital. Dalam pembangunan di Yogyakarta, kapitalisme yang mendominasi dibuktikan dengan pengabaian hak kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak, terutama bagi masyarakat marjinal yang tidak memiliki kepentingan dan kekuasaan dalam pembangunan revitalisasi Sumbu Filosofi. Dalam sikap harmoni yang sengaja dibentuk, rakyat yang terdampak revitalisasi berpotensi terjadi konflik karena adanya ketimpangan sosial yang dirasakan. Pembangunan menjadi hal yang sepatutnya dipertanyakan ulang, karena menjadi rawan terjadinya sebuah ketimpangan yang baru. Padahal, semestinya pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk menjadi sasaran utama tumbuhnya kegiatan sosial, ekonomi, budaya; sehingga bersama-sama melahirkan bangkitnya keterpurukan masyarakat dari aspek ekonomi yang berdampak pada kehidupan sosial. Sebuah kritik Karl Marx atas sistem kapitalisme yang sangat terkenal, ditulis dalam buku berjudul : *Das Kapital*, menimbulkan pertanyaan mengenai pembangunan, lantas apakah pembangunan dalam revitalisasi yang mengusung nilai filosofis semestinya sarat akan nilai kemanusiaan justru menjadikan munculnya kapitalisme dalam rupa yang lain?

Konsep *Nrimo ing Pandum*, seakan menimbulkan kesan bahwa ketika Orang Jawa dihadapkan pada tantangan atau cobaan, mereka seringkali terkesan pasif dan berpasrah diri. Jika ditelisik lebih lanjut, istilah *Nrimo ing Pandum* yang terdapat dalam sebuah pepatah, tidak dituliskan secara lengkap. Ungkapan *Nrimo ing Pandum*, semestinya tidak berdiri sendiri karena juga diikuti dengan *Makaryo in Nyoto*, yang berarti keseluruhan ungkapan tersebut memiliki makna untuk mengingatkan manusia bahwa tidak semuanya berada di bawah kuasa atau keinginan kita, maka sebagai tubuh yang sadar, mestinya belajar untuk tidak menerima begitu saja hal-hal yang ada di luar kemampuan sebagai manusia, berserah bukan berarti pasrah. Konkritnya, di Yogyakarta adalah masalah pengupahan dengan nominal yang sangat kecil, nilai pada pengupahan tersebut menjadi tolak ukur kelayakan sebuah pendapatan, baik bagi pekerja formal maupun pekerja informal. Adanya miskonsepsi terhadap nilai dalam memahami konsep *Nrimo ing Pandum*, seakan memiliki kesan bahwa dalam filosofi Orang Jawa dihadapkan pada suatu cobaan ataupun tantangan, mereka cenderung pasif dan berpasrah diri, padahal yang seharusnya terjadi adalah sebuah sikap untuk tetap berserah diri namun tidak selalu ikut arus, bilamana arus tersebut tidak baik dan bahkan menciptakan pusaran yang membawa kehidupan sehari-hari dipenuhi kekelaman. Pemaknaan terhadap konsep nilai *Nrimo ing Pandum*, yang seringkali lebih condong ke arah pasrah dan pasif menjadi tidak tepat. Sikap menerima pada

sebagian besar masyarakat di Yogyakarta, yang mayoritas masih bersuku Jawa semestinya perlu untuk dipertanyakan ulang. Para sesepuh, bahkan; telah memberikan contoh bahwa sebagai manusia mesti memiliki prinsip, karena tidak boleh hanya menurut *Koyo Kebo Dicucuk Irunge* yang berarti menurut dan mengikuti apa-apa saja yang dikatakan oleh orang lain, tanpa melakukan telaah ulang atas nilai dogmatis yang telah mengakar. Hal yang menjadi ironi ketika manusia semestinya sebagai makhluk yang berdaulat atas dirinya sendiri, namun tidak memiliki eksistensinya untuk meng-antitesiskan konsep *Koyo Kebo Dicucuk Irunge*, karena adanya sistem yang lebih besar sehingga terkungkung didalam tanpa berani berbuat apa-apa.

Penerimaan pada rakyat kecil terhadap ketimpangan, dalam kaca mata Gramsci dapat dijelaskan sebagai bagian dari mobilisasi pengetahuan dan moralitas yang dilakukan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan basis sosial (Patnaik, 2012). Terlebih, Sultan HB X pernah menjelaskan bahwa parameter yang digunakan dalam melihat kemiskinan di DIY belum memadai karena tidak mengukur tabungan hewan ternak milik warga miskin, rakyat kecil memilih *nrimo* asalkan hewan ternaknya tetap sehat (Kumparan, 2019). Kenyataannya, rakyat kecil di Yogyakarta bukan hanya petani dan peternak saja, namun juga pekerja yang secara golongan termasuk kaum prekariat. Bentuk penerimaan tanpa adanya perlawanan, adalah bentuk naluri kelas dari rakyat kecil untuk menormalisasi keadaan disebabkan ketidakmampuan dalam membangun perjuangan kelas. Posisi rakyat yang lemah diantara golongan lain yang lebih kuat, membuat mereka menjadi pasif dalam aktivitas politik. Dengan demikian, seolah-olah keadaan penghidupan di tiap kelas sosial terlihat normal, akibat tidak adanya kesadaran dari kaum proletar untuk mempertanyakan kemiskinan yang mereka hadapi (Patnaik, 2012).

Kesadaran yang terbangun pada diri masing-masing manusia semestinya selalu ada, meski dalam praktiknya menuai tanggapan yang berbeda-beda. Sebagaimana informan lain yang menanggapi terkait dengan sistem pendapatan yang minim:

*“... menurut saya, kata kata (-miskin tapi bahagia) hanya untuk menghibur diri. Kenyataannya, warga Jogja sendiri tercekik dengan biaya hidup yang tinggi tapi UMR rendah. Apalagi saya sangat yakin, keluarga menengah kebawah tidak mungkin mampu membeli tanah di kota Jogja. Kesenjangan sangat jelas dan nyata di Jogja. Dan pada kenyataannya, hidup serba kekurangan itu sama sekali tidak membahagiakan. Bahkan tidak ada orang miskin, yang tidak menderita...”* (RA, 24 tahun, Perempuan)

Realitas yang terjadi di Yogyakarta menunjukkan bahwa rakyat kecil yang berangkat dari akar-rumput tidak mampu untuk membangun aliansi kelas bersama dengan para intelektual organik. Para intelektual organik, justru terkesan bergerak sendiri dengan mengandalkan kekuatan yang ada di dalam kelas sosialnya, tanpa membangun kesadaran kritis bagi rakyat dalam tataran akar-rumput. Dalam praktiknya, menghadapi hegemoni kelas penguasa perlu menandingi mobilisasi budaya, ideologi dan wacana pengetahuan yang disampaikan (Gündoğan, 2008). Ketiadaan pendidikan alternatif dalam membangun kesadaran kritis pada masyarakat, justru menyebabkan rakyat di Yogyakarta mewajarkan kondisi kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2015-2017 menunjukkan sikap kepasrahan masyarakat proletar terhadap kondisi ketimpangan yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Sebab, kemiskinan yang diderita adalah sebuah takdir Tuhan yang tidak dapat ditolak, bahkan kepercayaan secara kolektif bahwa mereka masih dapat memenuhi penghidupan dengan adanya bantuan dari lingkungan sosialnya (Hadi, 2019).

Sejatinya, sebuah pemerintahan yang masih kental dengan corak Jawa serta masih mengusung nilai-nilai ke-Jawa-an dalam bentuk pemerintahan, serta memiliki hak absolut dalam persetujuan kebijakan, semestinya juga mampu dalam menerapkan praktik nilai-nilai filosofis yang mengusung ke-Jawa-an sebagai identitasnya. Bukan semata menggunakan nilai-nilai luhur Jawa sebagai tameng dalam melanggengkan politik dan kekuasaan, tanpa melihat dan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh para pendukungnya.

### 3.2. Kisah Para Pekerja Prekariat agar Tak Kian Melarat

Pergantian rezim dari Orde Baru ke pasca reformasi tahun 1998, nyatanya semakin memasukkan rakyat ke dalam pusaran rezim pasar. Pemerintah dalam tekanan IMF dan Bank Dunia, membuat regulasi-regulasi yang sesuai dengan rumusan neo-liberal sebagaimana berlangsung di negara-negara pasca-krisis moneter lainnya: (1) memperluas industri dan investasi swasta investasi swasta (transnasional maupun nasional); (2) privatisasi BUMN; dan, (3) pengurangan subsidi sosial (Clarke, 2005; Lapavitsas, 2005; Duménil & Lévy, 2005; Palley, 2005; Harvey, 2007; England & Ward, 2007). Dalam kondisi tersebut, rakyat dituntut untuk 'lebih keras' dalam bekerja, agar bisa melanjutkan tradisi konsumsi yang diwarisi dari Orde baru, sehingga tidak mengherankan jika migrasi ke kota atau menjadi buruh kasar di luar negeri menjadi pilihan utama bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk digarap, atau bosan menjadi buruh di desa. Paradigma yang telah tertanam, dibiasakan untuk bergantung pada negara dan pasar, sehingga banyak yang memilih migrasi untuk menjadi buruh pabrik, buruh rumah tangga, atau pedagang makanan. Sebab, dengan pendapatan yang diterima dari pengupahan, baik dalam sistem formal maupun informal; mereka bisa membangun rumah, membeli kendaraan, atau keperluan konsumtif lainnya. Ideologi kemakmuran menjadi orientasi yang dominan dalam masyarakat level regional hingga nasional, sehingga orang-orang tersebut mengubah orientasi dalam memaknai kehidupan, dengan mementingkan capaian-capaian duniawi, tanpa pertimbangan manusiawi.

Kondisi-kondisi serba tidak pasti yang terjadi akhir-akhir ini, bukan tanpa sebab. Jika menarik kembali sejarah, stagnansi politik pada kelas pekerja menjadi mundur di bawah Orde Baru, sebab ketidak-berlanjutan politik Orde Lama serta diberangusnya PKI termasuk afiliasinya. Pada era Orde Baru, otoritarianisme membentuk kondisi dimana serikat buruh yang beragam dibekukan, lantas pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 yang memperbolehkan perusahaan mengambil 'tindakan yang diperlukan' dalam menangani kasus pekerja yang mogok kerja, entah itu sifatnya intimidasi melalui kekerasan maupun pemecatan sepihak. Praktik kekerasan seakan menjadi cara yang ampuh dalam upaya penertiban dan membuat kondisi seolah aman.

Seorang teolog dari Peru sekaligus imam ordo Dominikan sebagai penggagas Teologi Pembebasan, mencatat beberapa kesalahan persepsi dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, kemiskinan diatasi dengan menekankan pola pembangunan (*development*), sebuah negara harus membangun dirinya untuk memproduksi barang ekonomi secara mandiri agar tidak tergantung dengan barang impor. Sistem pembangunan semacam ini adalah sistem pembangunan kapitalistik sebab sistem ini terbukti berhasil seperti yang terlihat pada negara-negara Barat, atas nama pembangunan; halangan sosial, politik dan budaya harus diatasi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Namun, bagi Amerika Latin, alih-alih kemakmuran – justru kemiskinan yang diperoleh, sebab kemakmuran hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ia menyayangkan bahwa sistem ini melahirkan sikap dan hidup individualistis karena adanya kompetisi. Sebuah sistem tidak serta-merta dapat diterapkan pada suatu masyarakat tertentu sebab situasi sosial-politik yang berbeda. Pembangunan sejati adalah pembangunan

yang menyangkut pembangunan ekonomi, sosial politik dan budaya (Gutiérrez, 1987). Serupa dengan Amerika Latin, Indonesia – lebih spesifiknya Yogyakarta, daerah yang kaya dan subur namun penduduknya miskin. Menurut Gutiérrez (1985), kemiskinan yang dialami oleh penduduk Amerika Latin dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, benar bahwa mayoritas penduduk adalah orang miskin karena terlahir sebagai orang miskin, stigma bahwa mereka adalah orang yang malas, tidak memiliki kreativitas dalam bekerja, tidak disiplin hingga terlalu santai – adalah bentuk kemiskinan yang disebut kemiskinan individual. Namun kemiskinan tersebut dapat diatasi dengan memberikan pelatihan, pendidikan atau pembinaan secara mental. Kedua, jauh lebih kompleks; sebab jenis kedua adalah kemiskinan yang disebabkan oleh orang lain, berupa penindasan, eksploitasi hingga penghisapan tenaga sehingga orang tersebut terpasung di dalam kemiskinan (Gutiérrez, 1985). Ada sistem-sistem tertentu yang mengatur sehingga terjadi pemasungan dan pembungkaman. Struktur masyarakat seolah-olah tercipta demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat namun kenyataannya struktur itu membelenggu orang di dalam kemiskinan (Chen, 2002). Untuk mengatasi kemiskinan jenis ini perlu dirobak secara total. Untuk itu dibutuhkan perubahan sosial secara radikal. Nampak jelas dari gagasan Gutiérrez ini adanya usaha revolusi pemikiran tentang perjuangan sosial yang keras. Pembicaraan mengenai sesuatu yang *mengawang* sebagaimana konsep pada Sumbu Filosofi, tidak mungkin bisa tercapai tanpa adanya laku konkrit. Hal-hal transenden tidak mungkin diwartakan tanpa adanya sebuah perubahan pada tatanan masyarakat yang tidak adil (Gutiérrez, 1973).

Faruk (1995) dalam perspektif Marxian menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru yang terbuka dan bercorak kapitalistis telah membuat dunia rakyat Indonesia menjadi sama sekali baru. Konsep dan kebijaksanaan dalam pertumbuhan ekonomi, menempatkan uang sebagai pusat segala aktivitas manusia. Lembaga produksi dan konsumsi menjamur seperti pabrik, pasar, supermarket bank dan rarusan media masa sebagai alat propaganda. Berbagai benda dan hal diperlukan sebagai alat tukar, bukan produksi dalam pemenuhan kebutuhan yang berdikari. Mengerikan bahwa fakta pasca Orde Baru hingga saat ini, kapitalisme negara masih dibutuhkan; bukan sebagai kenyataan dari momen yang tumpang tindih, melainkan sebuah jalinan relasional dengan “kapitalisme yang terencana” yang bersifat neoliberal. Singkatnya, momen neo-liberalisme, yang agak berbeda dengan cara-cara liberal klasik dimana tidak memeburuhkan negara dalam ekonomi pasar, namun saat ini menjadi membutuhkan negara bahkan juga aktor non-negara (Devine & Baca, 2020). Sehingga kemiripan pada konteks rezim Orde Baru di Indonesia, di mana terbentuk kapitalisme negara, yang berarti tujuan mengedepankan keuntungan seluas-luasnya yang terinstitusionalisasi ke dalam negara eksis (Batubara, 2020).

Secara teoritis, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau yang dikenal juga sebagai Ekonomi Kerakyatan. Namun benarkah demikian adanya? Dalam proses observasi yang dilakukan dalam perkampungan di tengah kota serta satu pusat perniagaan yang berada di Malioboro, *rakyat kecil* – mereka banyak mengeluh terkait sulitnya kehidupan saat sekarang ini. Jika ekonomi yang berjalan memang benar atas dasar kerakyatan, maka semestinya kecil kemungkinan ketika rakyat yang mengeluhkan terkait ketidakpastian serta beratnya bertahan hidup. Skema yang terbentuk saat ini, akhirnya membuat ketidak-pastian kerja dan kaum yang mengisi ceruk sosial tersebut akan selalu diperlukan untuk memperpanjang nafas kapital. Hal yang semestinya tidak perlu terjadi pada Yogyakarta – sebagai daerah yang sarat akan nilai-nilai filosofis.

Fenomena bahwa pekerja prekariat masih menjadi lapis paling bawah dalam piramida sosial sebab posisinya yang belum menghadirkan secara signifikan untuk melindungi hak-hak

sebagai pekerja, karena ketiadaannya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kerja. Maka, agar kisah-kisah elegi ini tidak lagi banyak terjadi, kedepannya perlu adanya refleksi yang lebih abstraktif untuk lebih detil dalam menjawab pertanyaan bagaimana proses prekariat ini tercipta, hingga dampak yang terasa pada segala lini permasalahan dibawah panji kapitalisme yang bersembunyi di bawah konsep ekonomi yang katanya menjunjung tinggi asas rakyat kecil.

Adaptasi diperlukan agar manusia dapat terus bertahan hidup, begitupula dengan kehidupan sosial para prekariat di Yogyakarta. Dalam pengamatan saya, perasaan genting saat ini tidak hanya terbatas pada generasi pencari kerja pasca *baby-boom*, sebab ini merupakan trend global yang melewati batas generasi. Daur hidup sebagai manusia, tidak bisa terwujud begitu saja dengan adanya sistem dan cara bekerja yang tidak manusiawi, baik dalam sektor formal hingga informal. Pergeseran pola pekerjaan informal yang banyak menjadi pilihan, bukan serta-merta dikarenakan karakter generasi yang sering disematkan kepada generasi yang bekerja pada rentang usia 25-45 tahun belakangan ini, namun juga adanya peran dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem kerja kontrak, sistem alih daya – atau yang dikenal dengan istilah *outsourcing*, upah terbatas, hingga ketidakpastian jaminan kerja dan sosial yang telah dibangun dalam sistem yang lebih besar lagi.

Pergerakan zaman dan perubahan sosial yang melanda seluruh dunia, akibat adanya pengaruh besar sistem kapital seakan membuat pola hidup sebagai manusia yang berdaulat, berubah menjadi manusia yang terjebak dalam roda kerja mekanis. Kehidupan yang semestinya dapat dinikmati sebagai kisah pelajaran hidup, menjadi kisah elegi yang mesti dihadapi sehari-hari. Beberapa pekerja informal yang saya temui dalam proses observasi, juga mengatakan hal kurang lebih sama: Yogyakarta tidak lagi berhati nyaman. Sebuah slogan ‘Jogja Berhati Nyaman’ seakan menjadi sebuah legenda romantisir belaka. Kesulitan dalam mendapatkan penghasilan secara ajeg, juga dirasakan bagi sebagian besar prekariat yang masih bertahan di Yogyakarta. Ada saja cara untuk merekrut mereka dengan sistem oportunistis, yaitu menginginkan tenaga, isi otak serta kreativitasnya, namun kapital enggan memenuhi hak yang didapatkan sebagai buruh, maka skema kerja yang ditawarkan adalah dibawah kontrak proyek.

*“... kalo menurut saya ya pendapatan minim tuh 8 juta per bulan. Mengingat banyak generasi muda saat ini di DIY yang kesulitan memiliki atau membeli, atau sekedar merawat aset seperti tempat tinggal, kendaraan, dll. Selain itu banyak pula yang memiliki beban menanggung pajak aset-aset yang diwariskan keluarga apalagi jika aset-aset tersebut bukanlah aset yang produktif. Belum tanggungan kebutuhan pokok. Maka dari itu nominal minimal tersebut paling tidak bisa membuat warga memiliki dana tabungan untuk mengembangkan hidup.” (JY, 38 tahun, Laki-laki)*

Seorang informan yang mengutarakan pendapatnya mengenai cara hidup dengan angan-angan pendapatan yang bisa dimiliki. Sekali waktu ketika ada penghasilan tambahan bisa *refreshing* dengan radius yang dekat, mengingat harus ada perhitungan yang matang dalam pengeluaran jika tak ingin mati di kota sendiri. Ada juga beberapa pengemudi ojek online yang kebetulan *mangkal* di warung daerah Gondolayu Lor. Pada hari dimana saya bertemu dengan 3 pengemudi ojek online yang sedang *mangkal* sebelum mendapatkan orderan. Rentang usianya 27 tahun hingga 40 tahun. Ketiganya adalah warga asli Yogyakarta, dan mereka berkisah tentang pengalamannya yang pindah-pindah tempat kerja, mulai dari ojek pangkalan, ojek panggilan, gojek, grab, bahkan merangkap juga shopee-food – hanya dalam rentang waktu kurang dari 5 tahun. Salah satu dari ketiga pengemudi ojek online tersebut berkeluh:

*“Saya tak patut berharap lagi, karena seluruh jaringan atau sosok yang berkewajiban melindungi sudah ada sejak dulu. Baik itu dari pemerintahan atau pun dari pihak si raja, juga aparat yang terstruktur dengan indahnya. Tapi ya, apa mau dikata. Kami bekerja hanya untuk menyambung hidup, itu sudah bersyukur – jangan banyak mimpi untuk bisa menabung atau bersenang-senang. Saya kasihan dengan anak-anak saya atau generasi sekarang, yang tenaganya diperas tapi tidak menikmati hasil sepenuhnya” – Pengemudi ojek online (1)*

Rekannya juga kemudian menimpali :

*“Kerjaan kayak begini ini, bisa terjadi bisa juga tidak karena hidup kan dinamis, hidup dan miskin menurut saya tidak bisa di jadi satu potret apalagi di lanjutkan dengan bahagia. Bila bahagia apakah masih teringat kalau miskin?” - Pengemudi ojek online (2)*

Keadaan serba tidak pasti yang dialami oleh para pekerja sebagai prekariat sebagai pekerja memang bukan hal baru, sebagaimana yang juga pernah ditemukan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ann Stoler, terkait dengan relasi kuasa yang dibentuk di perkebunan Sumatera sebagaimana dijabarkan dalam buku *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1970*. Praktik kerja kontrak dan alih daya, telah ada sejak masa perkebunan kolonial Belanda, dan secara jelas diatur dibawah *Koelieordonnantie* (Peraturan Ordonansi Kuli, yaitu sebuah hukum administratif kolonial yang mengatur kerja-kerja kuli).

Mereka yang bekerja untuk menyambung hidup dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, sebenarnya sadar bahwa hak-hak sebagai pekerja abai untuk dipenuhi, *pun* hal yang jelas melanggar hak asasi sebagai manusia, yang semestinya berdaulat atas dirinya sendiri. Para prekariat juga dijelaskan oleh Karl Marx sebagai salah satu bagian dari surplus populasi relatif (Marx, 1990), meski juga perlu diperhatikan bahwa Marx tidak spesifik langsung menunjuk kaum prekariat. Namun, surplus populasi yang relatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kelebihan populasi pekerja yang melebihi kebutuhan produksi oleh para pemodal. Maka tidak heran ketika para buruh memilih untuk berpindah-pindah ruang kerja sebab adanya regulasi yang tidak berpihak kepada para prekariat ini. Selain itu, mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus demi memenuhi kebutuhan hidup agar tidak terancam pada proses reproduksi sosial. Posisi negara di depan neoliberalisme serta mekanisme pasar kerja yang fleksibel, seolah tidak memiliki daya serta acapkali mejadi garda terdepan yang menghajar pekerja prekariat demi melindungi kapital.

### **3.3. Glorifikasi Kebahagiaan dalam Himpitan Kemiskinan**

Dua pemikir klasik, Hegel dan Marx memiliki pandangan berbeda mengenai kebahagiaan. Hegel menekankan bahwa kebahagiaan pada dasarnya merupakan konstruksi internal, bagian dari produk kognitif manusia. Sementara, Marx menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan konsekuensi dari praktik kerja sosial, bersifat material dan historis (Freund, 1985). Keduanya memiliki cara pandang yang fundamental, sekaligus memberi implikasi penting mengenai penggunaan terminologi kebahagiaan. Faktanya, Yogyakarta memiliki indeks kebahagiaan sebesar 71,7% pada tahun 2021 lalu, angka yang sedikit lebih besar dari indeks kebahagiaan rata-rata nasional yang sebesar 71,49%. Kendati ketimpangan hingga kemiskinan struktural terpampang nyata – tetap saja fakta tersebut terasa mengejutkan. Bagaimana mungkin

ketimpangan yang terbilang parah, akibat kemiskinan struktural justru tidak mendapat perhatian? Konsep 'hidup miskin tapi bahagia' seakan menjadi mitos yang diciptakan oleh oligarki. Ironi terjadi, tepat di hadapan rakyat dengan sikap polos serta tak lagi berpengharapan. "Hidup miskin tapi bahagia, sebatas menjadi pengobat lara atas situasi yang memaksanya kalah dan jadi pecundang" (Petikan wawancara bersama PH pada medio Maret 2024).

Hal yang menjadi penyebab jaranginya ada gerakan atau aksi, bahkan hanya berhenti pada wacana dalam menuntut pemerintah daerah untuk mengentaskan berbagai permasalahan sosial-ekonomi yang ada, karena kritik seringkali dilayangkan berupa tulisan hingga karya seni namun hal tersebut juga tidak mendapatkan atensi.

Merefleksikan hal tersebut, tulisan dari Nancy Lee Peluso dalam tulisannya *Rich Forest Poor People* (2002) menjadi dasar untuk memikirkan ulang mengapa pembangunan Sumbu Filosofi di Yogyakarta menumbuhkan hal-hal ironi. Dalam bukunya, Peluso mencoba untuk menggugah nalar kritis bahwa sumber daya alam yang merupakan milik rakyat, yang dititipkan pengelolaannya kepada negara melalui perusahaan pemerintah, namun yang terjadi adalah penyimpangan pengelolaan sehingga mengarah pada penguasaan sumber daya yang semena-mena, dan berdampak pada pemelaratn rakyat di sekitarnya. Jika menarik benang merah pada apa yang terjadi di Yogyakarta akhir-akhir ini, hal tersebut serupa namun tak sama. Sesuatu kontradiktif yang terjadi pada waktu ini, saat di dunia nyata melihat adanya konsekuensi yang kompleks atas angka pengangguran yang tinggi, meski menurut data dari Bappeda Yogyakarta angka pengangguran justru semakin turun dari tahun ke tahun. Meningkatnya ketidakpuasan oleh sosietas yang dapat menimbulkan gejolak sosial yang didorong oleh ketimpangan. Dalam kritik yang dilayangkan, mestinya rakyat juga menyoroti pertanyaan tentang mengapa animo masyarakat menjadi abai dan apatis terhadap adanya pembangunan pada Sumbu Filosofi, serta akibat atas ketimpangan tak terhindarkan sebagai konsekuensi atas pilihan tersebut.

Lebih lanjut, mengadopsi pemikiran James C Scott dalam konsep *survival mechanism*, menyebutkan strategi yang dilakukan oleh para petani agar bertahan hidup dalam melalui masa-masa sulit, terutama terkait dengan penghasil mereka yang menurun atau tidak mencukupi kebutuhan pokok, jika ditarik dalam konteks pekerja prekariat; Scott menyebutkan terdapat tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yaitu: (1) mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan cara makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah, (2) menggunakan alternatif subsisten yaitu swadaya yang mencakup usaha kecil-kecilan seperti bekerja sebagai tukang atau buruh serta melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan, (3) meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara hingga memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya. Mengadaptasi dari pemikiran Scott, menarik garis pada upaya resistensi warga lokal yang berada di perkampungan dan wilayah kerja yang bersinggungan dengan Sumbu Filosofi; adalah berusaha bertahan dan tetap waras dengan kesulitan finansial. Dalam keterbatasan, kemampuan beradaptasi manusia secara umum, dianggap lebih tinggi atas segala bentuk hingga struktur dalam ruang hidup, sebab mereka dapat berkembang pada berbagai modal sosial yang dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kemiskinan tidak pandang bulu, ia bertumbuh secara struktural dan menyebar pada kaum proletar, tidak pandang generasi, namun yang terdampak besar adalah generasi dengan usia produktif. Salah satu penyelamat generasi muda dari pendapatan yang rendah cenderung defisit pendapatan, adalah hidup bersama orang tua atau sanak keluarga lainnya (*ngindung*). Biaya akomodasi seperti tempat tinggal atau kebutuhan sehari-hari yang mendapat subsidi secara penuh atau parsial, cukup membawa keringanan. Artinya, jika masih ada kebergantungan terhadap patron yang memiliki kapital yang cukup, maka dianggap berkecukupan. Bukankah

menjadi ambigu apabila hanya melihat permasalahan struktural dengan cara pandang yang parsial? Defisit pendapatan yang terjadi, bukan karena standart UMP yang rendah, namun karena harga akomodasi dan kebutuhan yang tidak sepadan. Pengeluaran dengan nominal hampir sama dengan daerah lain yang memiliki UMP lebih tinggi, menjadi tidak relevan ketika membandingkan kenaikan UMP di Yogyakarta yang dianggap tinggi, sementara inflasi yang terjadi juga turut menyumbang defisit pemasukan yang menghinggapi generasi muda hingga saat ini. Kesadaran sebagian besar masyarakat terkait dengan nilai pendapatan yang rendah masih dianggap wajar. Ketidaksadaran yang mengakar dan meluas membuat sistem kelayakan pengupahan menjadi kian lemah. Lantas bagaimana upaya para prekariat bertahan dikala memiliki pendapatan yang kurang? Memiliki pekerjaan sampingan (*side-job*). Meskipun bekerja sampingan tidak dibenarkan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidup. Sebagaimana hakikat manusia sebagai *homo faber*, pendapatan dari satu jenis pekerjaan semestinya cukup untuk memenuhi kebutuhan, juga sebagai penghargaan atas aktualisasi diri serta kemampuan yang dimiliki. Sementara, pekerjaan sampingan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan aktualisasi diri, bukan sebagai target nominal guna menutup kebutuhan dasar hidup layak. Kedaulatan sebagai manusia menjadi hilang, manakala bekerja dengan sistem double-job yang dinormalisasi. Kemudian, tingkat produktifitas dianggap berhasil ketika dalam sebuah kerja produktif menghasilkan uang sebagai kompensasi dalam bentuk materi, tanpa berpikir kembali apa hakikat manusia untuk hidup dan bekerja. Materi dianggap sebagai tolak-ukur eksistensi manusia sebagai *homo-faber*, sementara kebutuhan hidup yang kian menghimpit ruang daulat sebagai manusia untuk bisa berkreasi, lantas menjadikan manusia sebagai mesin.

Pada era modern, dimana keserba-cepatan serta digitalisasi hidup mulai merajalela dalam tiap lini kehidupan, yang banyak terdampak adalah generasi milenial yang juga dikenal sebagai *burnout generation* (generasi kelelahan) atau *sandwich-gen* (generasi sandwich). Kelelahan seakan hal nyata yang memengaruhi para pekerja dengan laku hidup, dapat terlihat dari kesehatan mental serta *well-being* sehari-harinya (Harvey, 2017). Banyak tanda sebagai pengingat, meski seringkali menjadi abai bahwa peran negara semakin pudar, seperti ritme dalam kehidupan para individu dalam mencari penghidupan, misal. Efek domino dari neoliberal menjadikan masyarakat lupa bahwa sebenarnya kesejahteraan bagi setiap lapisan rakyat merupakan tanggung jawab negara, sebab kesejahteraan sosial bukanlah komoditas yang dapat dilepas begitu saja dalam mekanisme pasar bebas, sehingga negara juga perlu memastikan bahwa tiap-tiap warga negara dapat mengakses setiap fasilitas dan kesempatan secara mudah atau bahkan gratis. Kendati banyak faktor mengapa generasi milenial ini menjadi rentan terhadap distraksi, salah satunya karena tuntutan pekerjaan untuk menjadi perfeksionis sekaligus profesional meski dengan kompensasi yang tidak sebanding. Konsep awal bekerja yang semestinya sebagai bentuk aktualisasi diri berubah menjadi pekerja mekanik, yang bekerja seperti mesin; tanpa memiliki makna bekerja. Sebuah ironi yang tanpa disadari bahwa konsep filosofis yang tersemat pada Yogyakarta, tidak benar-benar dapat terimplementasikan oleh rakyat tidak dilibatkan dalam sebuah pembangunan.

Infrastruktur yang ada berupa ikatan patron-klien antara kelas penguasa lokal dengan rakyat kecil, sehingga memungkinkan adanya intelektual tradisional di akar rumput untuk memobilisasi rakyat kecil untuk mendukung agenda Keistimewaan dengan adanya pembangunan pada Sumbu Filosofi yang juga disokong oleh penguasa lokal. Rakyat tidak dapat secara mandiri memutuskan aspirasinya, atau bahkan membangun blok historisnya sendiri disebabkan kuatnya mobilisasi secara ekonomi dan budaya. Adanya aktor dalam ranah intelektual tradisional juga sangat kuat memanfaatkan saluran-saluran kebudayaan sebagai pintu masuk penting untuk membangun kesadaran dan konsensus di hadapan rakyat kecil.

Kondisi rakyat kecil yang mau tidak mau harus mengikuti pandangan blok historis kelas penguasa jelas memprihatinkan, terlebih intelektual tradisional di akar rumput yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat kecil justru memperjuangkan sendiri kepentingan kelasnya. Hal tersebut cukup miris, sebab kondisi rakyat kecil di Yogyakarta pasca Orde Baru sangat mengkhawatirkan. Realitas yang dapat dilihat melalui indikator kesenjangan pendapatan, yang diukur melalui koefisien gini. Tingkat kesenjangan pendapatan di Yogyakarta selalu menempati kondisi paling timpang dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

#### 4. Simpulan

Harapan adalah salah satu cara melanjutkan hidup, meski seringkali kehidupan membuat manusia merasa seolah mati. Ketimpangan distribusi pendapatan berdampak pada masalah kemiskinan yang sifatnya struktural. Pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan, tidak hanya berhenti sampai pemberian bantuan sosial, tanpa mencari tahu akar permasalahannya.

Masih sedikit masyarakat memahami atau sekedar mengetahui bahwa Yogyakarta memiliki misi dalam menjadikan *city of philosophy* dengan menggunakan Sumbu Filosofi sebagai ikon yang bisa dikomodifikasi. Jika sebagai rutinitas mendasar sehari-hari yang diperlukan manusia, seperti makan dan tidur saja – sampai tidak merasakan ketenangan atau perasaan damai kala menjalaninya, lantas bagaimana mampu mendapatkan makna untuk hidup sebagai individu yang berdaulat di tanahnya sendiri, apalagi sebuah wilayah dengan label istimewa? Karena, pada kenyataannya ada atau tidak ada Sumbu Filosofi, tidak ada yang berubah, stagnan atau lebih buruk; bahkan lebih fatal, taraf hidup yang kian turun.

Kesadaran yang minim bahwa kapitalisasi telah masuk kedalam ranah paling penting yang menunjang keberlangsungan hidup manusia mendasar, yaitu sandang-pangan-papan, baru setelahnya adalah pendidikan dan kesehatan. Berbagai ketidakpuasan akan pilihan hidup yang dirasa tidak adil, hanya berhenti pada lontaran kritik yang tertuang dalam kertas, sisanya aksi terkadang tidak membuahkan hasil. Padahal semestinya dalam pembangunan dan pemajuan sebuah bangsa, memiliki dasar yang kuat sebagaimana implemementasi azas ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bukan Keadilan Sosial Bagi Pemilik Kapital di Indonesia.

#### Referensi

- Batubara, Bosman. (2020b). Teman Rebahan: Kapitalisme dan Covid-19. Yogyakarta: Gading.
- Bonefeld, W. (2011). Primitive Accumulation and Capitalist Accumulation: Notes on Social Constitution and Expropriation. *Science & Society*, 75(3), 379–399.
- Chen, Martin. (2002). Teologi Gustavo Gutiérrez. Refleksi dari Praksis Kaum Miskin, Yogyakarta: Kanisius.
- Clarke, Simon. (2005). “The Neoliberal Theory of Society”. *Neoliberalism: Critical Reader*, edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston. London: Pluto Press
- Dahrendorf, Ralf. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: CA Stanford University Press.
- Devine, J. A., & Baca, J. A. (2020). The political forest in the era of green neoliberalism. *Antipode*, 52(4), 911–927.
- Duménil, Gérard & Dominique Lévy. 2005. “The Neoliberal (Counter-)Revolution”. *Neoliberalism: Critical Reader*, edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston, 9-19. London: Pluto Press
- England, Kim & Kevin Ward (eds). (2007). *Neoliberalization: States, Networks and Peoples*. Oxford: Blackwell Publishing.

- Faruk. (1995). *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Freund, M. (1985). Toward a critical theory of happiness: Philosophical background and methodological significance. *New Ideas in Psychology*, 3(1), 3-12
- Goorz, Andre. (2002). *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Goode, Judith., and Maskovsky, Jeff. (2001). *The Poverty Studies : The Ethnography Power, Politics, and Impoverished People in the United States*. New York: NYU Press
- Gündoğan, Ercan. (2008). "Conceptions of Hegemony in Antonio Gramsci's Southern Question and the Prison Notebooks." *New Proposals: Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry* 2, no. 1 (2008): 45–60.
- Hadi, Aulia. "Pola Kerentanan Masyarakat Miskin Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Keberlangsungan Hidupnya," dalam *Tinjauan Kritis Ketahanan Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Perdesaan: Ruang Sosial, Kebijakan Dan Pola Kerentanan Sosial*, ed. Thung Ju Lan (Jakarta: LIPI Press, 2019), 143–233.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Introduction to powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*. National University of Singapore Press and University of Hawaii Press.
- Harvey, David. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Mitchell, P.B. (2017). *Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors (2) (PDF) A Review on the Impact of Workplace Culture on Employee Mental Health and Well-Being*.
- Kinasih, Cahyaratri K. (2023). *Tourism Kill The City: Refleksi Gerakan Jogja Ora Didol Sub Kelompok Milenial Urban di Era Digital Studi Kasus Kelompok Lamidet Society*. *Memetika: Jurnal Kajian Budaya*, Volume 5, Nomor 2, 2023 pp. 40-46
- Lapavistas, Costas. (2005). "Mainstream Economics in the Neoliberal Era. In *Neoliberalism: Critical Reader*, edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston. London: Pluto Press
- Lay, T., J. Hernlund, and B. A. Buffett. (2008), Core-mantle boundary heat flow, *Nat. Geosci.*, 1, 25–32.
- Lombard, J. R., & Morris, J. C. (2012). Using Privatization Theory to Analyze Economic Development Projects: Promise and Performance. *Public Performance & Management Review*, 35(4), 643–659.
- Marx, Karl. (2004). *Kapital, sebuah kritik ekonomi politik, buku I: proses produksi kapitalis secara menyeluruh*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Palley, Thomas I. (2005). "From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics". *Neoliberalism: Critical Reader*, edited by Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston. London: Pluto Press.
- Patnaik, Arun. (2012). "The Contemporary Significance of Gramsci's Critique of Civil Society," *WorkingUSA: The Journal of Labor and Society* 15:2012, 577–588.
- Peluso, Nancy Lee. (1994). *Rich Forests, Poor People, Resource Control and Resistance in Java*. London: University of California Press
- Schmid, K. (2015). Accumulation by dispossession in tourism. *Anthropologica*, 115–125.
- Scott, James C. (1981). *Moral Ekonomi Petani Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Stoller, Ann. (2005). *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979*. Yogyakarta: Karsa Lingkar untuk Pembaruan Pedesaan dan Agraria
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997